

SKRIPSI

**KEBIJAKAN FISKAL PADA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN :
ANALISIS KAUSALITAS**

NURSYAMSI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**KEBIJAKAN FISKAL PADA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN :
ANALISIS KAUSALITAS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

NURSYAMSI

A011181338



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

KEBIJAKAN FISKAL PADA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN : ANALISIS KAUSALITAS

disusun dan diajukan oleh :

NURSYAMSI

A011181338

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 09 Januari 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E., M.A., CRP.
NIP. 19590306 198503 1 002

Pembimbing II



Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., M.A., CWM.
NIP. 19651012 199903 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM.
NIP. 19740715 200212 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KEBIJAKAN FISKAL PADA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN : ANALISIS KAUSALITAS

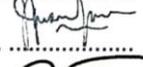
disusun dan diajukan oleh :

NURSYAMSI

A011181338

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 09 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,
Panitia penguji :

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E., M.A., CRP.	Ketua	1. 
2. Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., M.A., CWM.	Sekretaris	2. 
3. Dr. Agussalim, S.E., M.Si.	Anggota	3. 
4. Dr. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si., CPF.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM.
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURSYAMSI

NIM : A011181338

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Jenjang : Sarjana (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

KEBIJAKAN FISKAL PADA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN : ANALISIS KAUSALITAS

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2023

Yang membuat pernyataan



NURSYAMSI

PRAKATA

Alhamdulillah segala pujian terbaik dan bentuk syukur penulis limpahkan sepenuhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Rabb yang benar dan berhak untuk disembah, tidak ada sekutu bagi-Nya serta tidak ada sesuatu apapun yang berhak disandingkan dengan-Nya sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis mampu mengusahakan hingga mencapai titik akhir terselesaikannya salah satu karya ilmiah skripsi ini dengan judul "Kebijakan Fiskal pada Perekonomian Sulawesi Selatan : Analisis Kausalitas". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang manusia terbaik, yang paling lembut hatinya, Baginda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kepada ketiga generasi pengikutnya yang terbaik para salafush shalih, serta orang-orang yang senantiasa berjalan mengikuti sunnahnya. Sampainya penulis pada tahap akhir penyusunan skripsi ini dilakukan tidak hanya sekedar untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis pun mengharapkan sedikit masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Dari banyak sisi penulis mengetahui skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu dengan terbuka penulis akan menerima kritik disertai dengan saran yang membangun dari pembaca agar celah yang masih mungkin diperbaiki dapat menjadi lebih baik. Skripsi ini juga diharapkan mampu

memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang terkait yakni ilmu ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta dibalik terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi banyak pihak yang telah mendukung penulis yang mereka masing-masing sanggupi di bidangnya. Maka tentu saja penulis berkewajiban dalam menghargai dan berterima kasih setulusnya atas seluruh waktu, usaha dan letih yang mereka telah bersedia luangkan kepada penulis. Berikut ini dengan khusus penulis sampaikan :

1. Kepada bapak (rahimahullah) dan ibuku yang melalui cara mereka menghadapi berbagai fase dalam hidupnya, secara tidak langsung telah mengajarkan banyak hal dan membentuk diri penulis yang saat ini, atas lelah dan letihmu dalam mengupayakan hal-hal yang kiranya terbaik untukku, kuucapkan terima kasih tak terhingga.
2. Kepada kedua kakak laki-laki, kakak ipar terima kasih atas semua porsi pertolongan dengan cara kalian masing-masing dalam memahami penulis, serta kedua kucing kesayangan yang selalu menjadi rumah terbaik.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM. sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, terima kasih atas banyaknya bentuk kepedulian, perhatian dan arahan bapak kepada mahasiswa/(i) dalam mengupayakan solusi terbaik atas variasi kesulitan yang kami hadapi.
4. Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi, terima kasih banyak atas arahan dan ilmu yang ibu berikan.
5. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP. dan Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM. sebagai dosen pembimbing yang telah

begitu banyak memberikan ilmu baik yang sifatnya akademik maupun non-akademik selama proses perkuliahan hingga proses bimbingan skripsi, senantiasa memberikan arahan, mendampingi dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis ditengah kesibukan.

6. Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si. sebagai dosen penguji I yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, nasihat serta kritik yang membangun selama proses seminar proposal hingga ujian skripsi berlangsung.
7. Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF. sebagai dosen penguji II terima kasih atas kebaikan dan ucapan kasih yang senantiasa ibu sampaikan kepada penulis.
8. Segenap civitas departemen ilmu ekonomi yang berperan besar dalam terstrukturinya setiap rangkaian kegiatan perkuliahan dan proses ujian, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu Ilmu Ekonomi 2018, terima kasih banyak atas semua momen kebersamaan selama perkuliahan yang terjalin baik dalam suka maupun duka.
10. Teman-temanku di '*Tamalanrea Prefecture*' Tami, Khalifah, Yaya, Yeni, Fitrah, Tasya, Mutmut, Ikka, Naya, Rindi, Yuni semuanya, kuucapkan terima kasih banyak dan kuhargai semua waktu dan pertolongan kalian yang telah menemani dan menjadi bagian dalam hidup, telah menjadi teman kuliah beberapa tahun ini, semoga kebaikan-kebaikan yang kalian langitkan kepada Allah segera terwujud melalui jalan yang indah, sehat terus ya.
11. Kedua temanku yang kini telah menjadi seorang ibu, Wulan Ramadhani dan Khairiah Akkas terima kasih banyak telah menjadi pendengar untuk penulis, semoga tidak lepas pertolongan dan perlindungan Allah untuk

kalian yang senantiasa berupaya menjadi wanita shalihah agar selamat kalian dan generasi penerus kalian dalam mendidik.

12. Semua pihak penyedia jasa print dan fotocopy yang keberadaannya sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Makassar, Desember 2023

NURSYAMSI

ABSTRAK

KEBIJAKAN FISKAL PADA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN : ANALISIS KAUSALITAS

Nursyamsi
Abdul Hamid Paddu
Indraswati Tri Abdi Reviane

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah yakni belanja modal dan belanja bansos, penerimaan pemerintah daerah yakni pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kausalitas granger dengan menggunakan program aplikasi Eviews. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang berupa data time series atau data runtut waktu dari tahun 2007 sampai tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan dekonomi dengan belanja modal, hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah, dan hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi pendapatan transfer Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci : belanja modal, belanja bansos, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pertumbuhan ekonomi, hubungan kausalitas.

ABSTRACT

FISCAL POLICY ON THE SOUTH SULAWESI ECONOMY: A CAUSALITY ANALYSIS

Nursyamsi
Abdul Hamid Paddu
Indraswati Tri Abdi Reviane

This study aims to measure the causality relationship between local government expenditure, namely capital expenditure and social assistance expenditure, local government revenue, namely local own revenue and transfer revenue, and economic growth in South Sulawesi Province. The method used in this research is granger causality analysis using the Eviews application programme. This research uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and other sources in the form of time series data or time series data from 2007 to 2019 South Sulawesi Province. The results obtained from this study indicate that there is a one-way causality relationship between economic growth and capital expenditure, a two-way causality relationship between economic growth and local revenue, and a one-way causality relationship between economic growth and transfer revenue of South Sulawesi Province.

Keywords: capital expenditure, social assistance expenditure, local revenue, transfer revenue, economic growth, causality relationship

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah.....	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	25
1.4 Manfaat Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Landasan Teoritis	26
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.1.2 Pengeluaran Daerah.....	28
2.1.3 Penerimaan Daerah.....	36
2.2 Hubungan Antar Variabel	41
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	42
2.2.2 Hubungan Penerimaan Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	43
2.3 Penelitian Terdahulu.....	45
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	49

2.5 Hipotesis Penelitian	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	53
3.1 Variabel Penelitian/Ruang Lingkup Penelitian	53
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.4 Metode Analisis Data.....	54
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Perkembangan Kebijakan Fiskal	60
4.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	62
4.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	63
4.4. Perkembangan Penerimaan Pemerintah Daerah.....	66
4.5. Hasil Analisis	69
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian	75
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Pertumbuhan Ekonomi	70
Tabel 4.2. Hasil Uji Stasioneritas Data Belanja Modal	70
Tabel 4.3. Hasil Uji Stasioneritas Data Belanja Bantuan Sosial	71
Tabel 4.4. Hasil Uji Stasioneritas Data Pendapatan Asli Daerah.....	71
Tabel 4.5. Hasil Uji Stasioneritas Data Pendapatan Transfer.....	72
Tabel 4.6. Hasil Pemilihan Panjang Lag Optimal Model Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.....	73
Tabel 4.7. Hasil Pemilihan Panjang Lag Optimal Model Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Bantuan Sosial.....	73
Tabel 4.8. Hasil Pemilihan Panjang Lag Optimal Model Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah	73
Tabel 4.9. Hasil Pemilihan Panjang Lag Optimal Model Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Transfer	73
Tabel 4.10. Hasil Uji Kausalitas Granger	75
Tabel 4.11. Komponen PDRB menurut Pengeluaran 10 Tahun Terakhir Periode Penelitian (dalam Persen)	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Perkembangan beberapa Jenis Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2019	21
Gambar 2.1. : Kerangka Pikir Penelitian	51
Gambar 4.1. : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007-2019.....	63
Gambar 4.2. : Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007-2019.....	65
Gambar 4.3. : Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007-2019.....	66
Gambar 4.4. : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007-2019.....	67
Gambar 4.5. : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007-2019.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep ekonomi pada awal perkembangannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar yang berimplikasi pada keterbatasan pemerintah dalam mengintervensi. Prinsip ini sering dikenal dengan *Laissez-faire (let it be)*. Namun mekanisme ini tidaklah selalu efisien dan efektif sehingga muncul gagasan oleh Keynes tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah yang mana gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa *Great Depression* yang menyebabkan tingginya pengangguran pada masa tersebut, di periode tahun 1920-an. Gagasan Keynes tersebut selanjutnya menjadi pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi tentang pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian.

Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Intervensinya sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila masih ada gap antara permintaan masyarakat dan suplainya, maka pemerintah harus masuk sebagai market player, baik itu turun langsung maupun melalui institusi yang mereka bentuk. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan adalah tujuan yang selalu ingin dicapai oleh setiap negara. Perekonomian dapat menjadi kuat jika memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi

tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki masing-masing negara, antara lain sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia dan kualitas birokrasi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan tersebut, serta pola kebijakan yang dilakukan.

Dalam konsep ekonomi sendiri dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro. Kebijakan fiskal adalah Kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran pendapatan (penerimaan) dan anggaran pembelanjaan (pengeluaran) pemerintah.

Kebijakan fiskal ini juga terbagi atas dua, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif tercermin dari bagaimana komposisi penerimaan negara lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya, sebaliknya kebijakan fiskal ekspansif yakni komposisi pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan penerimaannya, kebijakannya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau penurunan penerimaan pajak (T) dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat (AD). Peningkatan jumlah belanja yang tidak sebanding dengan pendapatan ini

akan menyebabkan negara mengalami defisit, dimana ukuran defisit tersebut memberikan gambaran seberapa ketat kebijakan tersebut (Richard Barwell, 2016). Kondisi perekonomian negara kurang baik yang dapat dilihat dari penurunan daya beli masyarakat diikuti dengan pengangguran yang tinggi maka pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan fiskal ekspansif yang berarti pemerintah melakukan kebijakan makro melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran negara yang defisit atau pengeluaran negara yang memang sengaja dianggarkan lebih besar dibanding penerimaannya dalam satu periode anggaran. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspansif ini untuk menjaga momentum dan menghindari *opportunity cost* untuk pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia selalu defisit, artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dibanding penerimaannya (dulu di masa orde baru pernah diterapkan kebijakan APBN berimbang atau *T Account*), hal ini juga berarti pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada pemerintah daerah dengan prinsip *Money Follow Functions* agar anggaran dapat dialokasikan sebaik mungkin (berkelanjutan, efektif dan efisien) yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang lebih terkait dana kepada masyarakat seluruhnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dengan harapan mampu menjamin pertumbuhan ekonomi kedepannya dalam jangka panjang dengan mempengaruhi *aggregate demand* sebagaimana menurut Keynes.

Pemerintah menerapkan kebijakan ini melalui belanja pemerintah yang tercermin dalam postur anggaran pendapatan dan belanja yang terbagi ke dalam

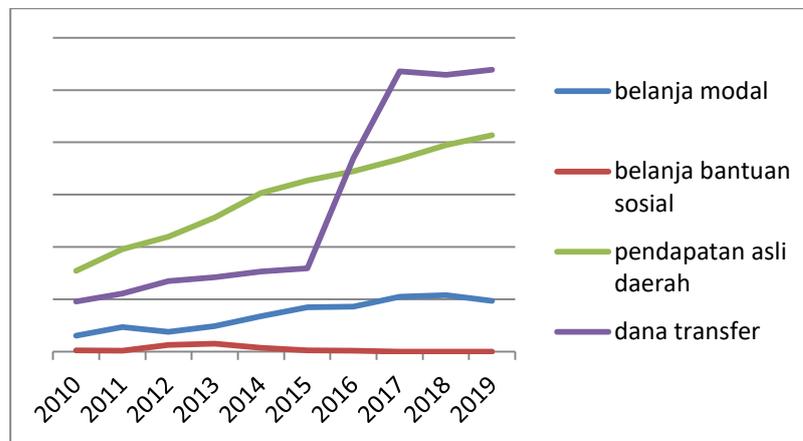
berbagai macam pos belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi pendanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib (*mandatory spending*), pilihan dan penanganannya dalam bidang tertentu untuk mendukung berbagai program dan kebijakan dalam stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan ini efektif dalam jangka waktu yang relatif tidak begitu lama karena pemerintah merupakan pembuat sekaligus sebagai pelaku kebijakan harapan besarnya bahwa kebijakan ini dapat menstimulasi peningkatan produk domestik bruto. Belanja pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi yang merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam makro ekonomi menurut pendekatan pengeluaran bahwa PDB terdiri dari komponen konsumsi rumah tangga (C), investasi (I) belanja pemerintah (G) dan net ekspor (X-M) atau disingkat $Y = C + I + G + (X-M)$. Belanja pemerintah yang disebutkan sebelumnya diatas membutuhkan produktivitas masing-masing komponen belanja pemerintah itu sendiri agar mampu memberikan kontribusi kepada PDB untuk periode berikutnya secara berkesinambungan, yang mana komponen-komponen belanja pemerintah tersebut haruslah dialokasikan kepada belanja yang tepat, bersifat produktif.

Dalam hal ini menjadi penting untuk lebih dulu mengetahui hubungan dinamis antara Produk Domestik Bruto dengan belanja pemerintah. Sebagaimana yang tercermin pada komponen pembentuk PDB sebelumnya bahwa memang belanja pemerintah merupakan salah satu komponen penyusun dari PDB, namun yang menjadi pertanyaan lebih jauh dalam penelitian ini untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah apakah belanja pemerintah di suatu periode mampu memberikan stimulus pertumbuhan di tahun terkait dan apakah benar

memberikan kontribusi kepada PDRB pada periode penelitian, begitu pula sebaliknya. Pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB, maka banyak opsi atas hal ini ada yang berpendapat dampaknya akan meningkatkan PDRB, menurunkan PDRB dan ada pula yang mengklaim bahwa tidak berpengaruh terhadap PDRB, yang mana hal ini didasari bahwa hasilnya tergantung pada kondisi perekonomiannya (Farrokh K. Langdana, 2009).

Seiring dengan perkembangan perekonomian, pengaruh belanja terhadap perekonomian juga mengalami transformasi, tuntutan terhadap efektivitas kinerja pemerintah yang tercermin dalam efisiensi birokrasi dan kapabilitas pemerintah dalam menciptakan inovasi kebijakan semakin tinggi. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar yaitu peranan alokasi, distribusi dan stabilisasi (Guritno Mangkoesoebroto). Sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai sasaran pembangunan, maka kebijakan fiskal yang dituangkan dalam bentuk APBN/APBD haruslah menganut ketiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiga fungsi inilah yang menjadi landasan dalam menyusun desain belanja yang dipakai oleh pemerintah, sehingga tentu saja mengharuskan pemerintah untuk fokus terhadap kinerja yang akan dicapai beserta alokasi anggaran yang tepat sasaran. Penganggaran yang tidak disertai pertimbangan struktur pengeluaran yang berkualitas tidak akan memberi dampak nyata pada perekonomian.

Gambar 1.1. : Perkembangan beberapa Jenis Pengeluaran dan Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah).

Perkembangan mengenai realisasi belanja modal, belanja bantuan sosial, pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer yang mana keempat aspek tersebut penting dalam mengelola keuangan daerah. Kebijakan keuangan yang tepat dalam hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan di daerah.

Belanja modal merujuk pada pengeluaran untuk investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia di suatu daerah. Dalam konteks ini, belanja modal berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan besarnya porsi belanja modal yang terealisasi di Provinsi Sulawesi Selatan dimana gap perubahan tiap tahunnya tidak begitu lebar sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan belanja yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, belanja bantuan sosial yang merupakan pengeluaran

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya perkembangannya setiap tahun berfluktuatif, hal ini karena belanja bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial yang alokasinya terus diusahakan tepat sasaran. Namun, pengeluaran ini juga dapat membebani keuangan daerah jika tidak direncanakan dengan baik.

Pada poros pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pajak, retribusi, dan penghasilan lainnya yang diterima dari kegiatan ekonomi di daerah tersebut perkembangannya stabil dan cenderung terus meningkat tiap tahunnya dengan jumlah yang besar yang selanjutnya memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek di daerah, termasuk belanja modal dan bantuan sosial. Disisi lain ada pendapatan transfer yang merupakan sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pihak lain. Pendapatan transfer ini dapat digunakan untuk mendukung belanja modal dan bantuan sosial, atau untuk memperkuat pendapatan asli daerah demi tercapainya hasil akhir yang bermanfaat bagi masyarakat keseluruhan.

Sehingga dalam hal ini mengelola keuangan daerah, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara masing-masing poros pengeluaran dan penerimaan daerah. Kebijakan yang tepat dapat membantu memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sumber pendanaan yang terbatas diikuti dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat mengharuskan pemerintah untuk lebih cermat dan tepat dalam mengalokasikan sumber dayanya, maka dari itu kualitas belanja (*quality of spending*) sangat penting dalam pengelolaan belanja, peningkatan kualitas belanja tersebut melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutannya sejalan dengan kerangka ekonomi makro jangka menengah yang menghasilkan strategi defisit/surplus dan utang yang berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur tentang defisit anggaran diterapkan, dimana porsi pengeluaran pemerintah dianggarkan lebih besar dibanding pendapatannya yang bertujuan untuk meningkatkan belanja dan/atau menurunkan pajak dengan tujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Namun bagi masyarakat yang rasional, kebijakan pemerintah menempuh anggaran yang defisit dengan memotong pajak tersebut memang memberikan dampak kenaikan pendapatan setelah pajak untuk saat ini. Pemotongan pajak yang dibiayai defisit yang tidak terduga berfungsi sebagai stimulus jangka pendek bagi perekonomian, bukan karena itu masuk akal. Beban utang yang lebih tinggi yang dihasilkan mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih buruk daripada peningkatan produk domestik jangka pendek dan “mengejutkan” perekonomian sepertinya bukanlah kebijakan yang baik di berbagai keadaan (Andrew Mountford and Harald Uhlig, UK). Hal ini disebabkan pada masa yang akan datang pemerintah perlu membayar cicilan dan bunga atas utang yang terakumulasi tersebut. Cara yang ditempuh oleh pemerintah biasanya dengan menaikkan pajak.

Hal ini terbukti sebab pemerintah sendiri untuk tahun 2023 telah memiliki beberapa strategi dalam mengurangi defisit anggaran agar dapat kembali di bawah 3% dengan meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya ditempuh melalui inovasi menggali potensi dan memperluas basis perpajakan yang mungkin saja bisa memberatkan masyarakat menengah kebawah. Jadi penurunan pajak saat ini dipandang oleh konsumen hanya memberikan pendapatan sementara (*transitory income*) saja dan pada masa yang akan datang akan diambil kembali oleh pemerintah. Dengan demikian konsumen tidak akan meningkatkan pengeluarannya saat ini.

Sehubungan dengan uraian diatas maka muncul pertanyaan terkait bagaimanakah arah hubungan dan pengaruh dari kebijakan fiskal yang dapat dilihat dari sisi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang ditempuh pemerintah selama ini dimana sistem penganggaran ini pengeluarannya selalu lebih besar dibandingkan penerimaannya, sehingga penelitian ini diberi judul, "**Kebijakan Fiskal pada Perekonomian Sulawesi Selatan : Analisis Kausalitas**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal dan belanja bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal dan belanja bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri terlebih dahulu serta pihak-pihak lain yang terkait sehingga dapat digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan di ranah perekonomian terkait dengan masalah yang dibatasi pada penelitian ini, sebagai tambahan wawasan tentang ekonomi publik khususnya terkait dengan pengeluaran pemerintah daerah serta memberikan penjelasan yang disertai dengan bukti empiris mengenai hubungan pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting ketika menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Karena kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya memberikan imbalan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Melalui pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga diharapkan meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika keuntungan riil dari penggunaan semua faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk skala Provinsi dan Kabupaten atau Kota, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai

total produksi (output) yang dihasilkan dalam periode 1 tahun karena merupakan salah satu indikator penting yang mampu mencerminkan kondisi dan kinerja perekonomian, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku berisi nilai tambah barang dan jasa yang perhitungannya menggunakan harga berlaku di setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Ketika menilai apakah perekonomian berlangsung baik atau buruk maka yang dilihat adalah total pendapatan yang diperoleh (Mankiw, 2006).

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan yang secara konsep ketiga pendekatan ini nilai akhirnya akan menunjukkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan kedalam 9 sektor lapangan usaha, (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (2) pertambangan dan penggalian (3) industri pengolahan (4) listrik, gas dan air bersih (5) konstruksi (6) perdagangan, hotel dan restoran (7) pengangkutan dan komunikasi (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan (9) jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintahan.

Dalam pendekatan pendapatan PDRB merupakan Jumlah balas jasa yang diterima selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi suatu daerah. Upah dan gaji, sewa, bunga modal, dan laba diperhitungkan sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi. Total pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Definisi PDRB mencakup depresiasi dan pajak tidak langsung bersih (pajak tidak langsung dikurangi subsidi). Yang terakhir, pada pendekatan pengeluaran PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, ekspor netto.

2.1.2 Pengeluaran Daerah

Setiap anggota masyarakat menginginkan kesejahteraan material dan spiritual dalam arti keinginan atau kebutuhannya yang terus berkembang dapat terpenuhi, disini pemerintah dalam kegiatannya ditujukan agar mampu mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, digunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuk, termasuk dana/uang. Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah, yang juga dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya publik untuk membiayai kegiatan pemerintah atau pemerintah itu sendiri guna memenuhi misi sosialnya mencapai kesejahteraan.

Pengeluaran mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Semakin besar dan banyak kegiatan

pemerintah, semakin besar pula pengeluaran yang dibutuhkan. Pengeluaran adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk skala pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hubungan pertumbuhan pengeluaran pemerintah telah menjadi area perdebatan eksploitasi intelektual yang meluas bagi peneliti dalam upaya menyelidiki efek kausal. Mengingat terdapat pandangan dari dua teori utama yang dominan dalam ranah ini, seperti Wagner dan Keynes. Dimulai dengan pandangan pertama bahwa pengeluaran pemerintah bersifat endogen terhadap pertumbuhan ekonomi, Wagner (1883) menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam suatu perekonomian dapat menyebabkan ekspansi pada pengeluaran pemerintah. Keynes (1936) di sisi lain menyatakan bahwa selama periode resesi, kegiatan ekonomi dapat dipacu dengan penggunaan kebijakan fiskal. Dengan kata lain, peningkatan belanja pemerintah, yakni kebijakan fiskal ekspansif dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Hukum Wagner memandang bahwa pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, sedangkan Hipotesis Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk meningkatkan perekonomian. Dalam studi ini, diselidiki apakah pengeluaran pemerintah yang berlebihan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul

dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan (Ferry Prasetya).

Pengeluaran pemerintah (publik) adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah (Aries Djaenuri, 2016), Pengeluaran pemerintah sering juga disebut pengeluaran publik karena merupakan pengeluaran untuk membiayai program pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Dalam sebuah pemerintahan, tentu pemerintah akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar operasional dan roda perekonomian tetap berjalan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama, yakni: 1). Pengeluaran pemerintah untuk membiayai barang dan jasa 2). Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga/pinjaman.

Untuk itulah, maka pemerintah dalam mempergunakan uang dan sumber sumber daya ekonomi lainnya haruslah berpedoman kepada prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah (*canons of government expenditure*). Pemerintah akan membayar gaji pegawai dan para pensiunan, membeli perlengkapan untuk keperluan para diplomat di luar negeri, dan sebagainya. Di samping itu pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah membangun fasilitas publik gratis (public service) untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat

seperti membangun taman kota, jalan tol, jembatan penghubung antar daerah ataupun pulau, dan sebagainya. Semua transaksi tersebut berakibat atau membentuk pengeluaran atau pembelian pemerintah.

Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Di samping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Model pembangunan tentang perkembangan belanja pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan dalam ekonomi yakni tahap awal, menengah dan tahap lanjut. Di tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah terhadap total investasi nilainya cukup besar sebab di tahap inilah proses awal pelaksanaan program sehingga pemerintah harus menyediakan prasarana yang memadai demi tercapainya tujuan, seperti menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, transportasi.

Di tahap selanjutnya yakni tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetaplah dibutuhkan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain, di tahap ini swasta dalam peranannya dalam investasi juga semakin besar, sehingga disinilah investasi pemerintah harus tetap berjalan, harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang tepat dan tidak boros anggaran sebab peranan swasta lebih beresiko meningkatkan banyak kegagalan pasar, kondisi ini sekali lagi menunjukkan bahwa pentingnya

intervensi pemerintah. Di tahap menengah ini juga terjadi hubungan antar sektor yang semakin kompleks.

Wagner mengemukakan teori mengenai perkembangan belanja pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap produk domestik bruto, hukum Wagner ini dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*" bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif belanja pemerintah pun akan meningkat. Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empirisnya dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Jepang. Disini Wagner menjelaskan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar hyang hal tersebut terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul di masyarakat.

Namun kelemahan teori wagner ini adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan perkembangan teori belanja pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar belanjanya sedangkan di sisi lain masyarakat juga tidak suka membayar besaran pajak yang semakin banyak untuk membiayai belanja pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori mereka ini merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman

mendasarkan teori mereka bahwa masyarakat juga mempunyai tingkat kesediaan atau toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat mengerti mengenai besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai belanjanya. Jadi, masyarakat sebenarnya sadar bahwa pemerintah memang membutuhkan dana, sehingga mereka mempunyai tingkatan kesediaan untuk membayar pajak yang mana tingkat toleransi inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak dengan semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman : pertumbuhan ekonomi menyebabkan pungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan belanja pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya produk domestik bruto menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitupun belanja pemerintah semakin besar. Dalam kondisi normal tersebut terganggu misal ada gangguan sosial seperti misalnya peperangan, maka mau tidak mau pemerintah harus memperbesar belanjanya untuk mengatasi gangguan social tersebut. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak, sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

Kondisi tersebut disebut dengan efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan social menyebabkan aktivitas swasta dialihkan ke aktivitas pemerintah. Kondisi gangguan social tadi dibiayai pemerintah bukan hanya dari pajak yang diterima negara tetapi juga melalui pinjaman luar negeri atau utang luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan meskipun kondisi gangguan sosial tadi telah berakhir, atau kondisi perekonomian sudah kembali membaik

mendekati kondisi normal, pemerintah sebenarnya bisa mengembalikan tarif pajak ke kondisi normal sebelum gangguan sosial, namun hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan karena pemerintah masih punya kewajiban untuk membayar pinjaman tadi, hal inilah yang mengakibatkan belanja pemerintah meningkat karena PDRB yang mulai meningkat kembali akibat pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah kondisi gangguan sosial berakhir. Ini yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan beralih ke tangan pemerintah yang semula dilaksanakan untuk swasta. Ini yang disebut efek konsentrasi (*concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman ini juga mengemukakan adanya toleransi pajak yakni limit dalam perpajakan, tetapi dalam hal ini mereka tidak menyebutkan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut.

Menurut Birds, efek pengalihan (*displacement effect*) oleh Peacock dan Wiseman tadi merupakan gejala yang hanya terjadi dalam jangka pendek yang mana juga diikuti oleh peningkatan persentase belanja pemerintah tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang sebab setelah terjadi gangguan social, persentase belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto perlahan-lahan akan kembali ke keadaan semula. Clarke, menyatakan bahwa limit dalam perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional, yang mana apabila limit tersebut dilampaui maka inflasi akan terjadi bersamaan dengan timbulnya berbagai macam gangguan lainnya.

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam pengeluaran pemerintah daerah dalam format dan struktur I-account

sebagaimana diatur dalam UU NO. 17 Tahun 2003 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Belanja Modal

Belanja Modal, merupakan salah satu komponen belanja langsung pemerintah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi berupa komponen krusial bagi peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya), merupakan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Kebijakan tersebut selaras dengan langkah *spending better* penguatan belanja modal yakni ditujukan untuk membentuk aset dalam meningkatkan ekuitas dan investasi pemerintah pendukung pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja ini meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, irigasi dan jaringan, modal lainnya dan modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Misalnya dalam hal ini, BLUD dalam rangka penyelenggaraannya, merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang), pengelolaan wilayah/kawasan tertentu serta rumpun lainnya dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sejak pemberlakuan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU dan BLUD terus mengalami perkembangan, baik jumlah, kualitas dan layanan.

2.1.2.2 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, termasuk kategori belanja tidak langsung merupakan seluruh pengeluaran yang dialokasikan sebagai transfer uang dan/atau barang yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial. Bentuk belanja bantuan sosial yang disalurkan terdiri atas uang, barang dan/atau jasa.

Bantuan sosial ini diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

2.1.3 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Seluruh jenis penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan, secara jelas tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah berasal dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah. Penerimaan ini merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sumber sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, pihak swasta dan lain-lain.

Penerimaan daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sangat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah diatur lebih lanjut pada Undang-Undang berdasarkan prinsip transparansi menunjukkan dan memberikan perubahan serta sangat penting dalam membiayai pembangunan dalam era otonomi terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pinjaman daerah dan lainnya penerimaan daerah yang sah.

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk keuangannya. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas

pemerintah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan mendorong inovasi. Seiring dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya, terutama PAD, untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, tuntutan untuk mengoptimalkan potensi PAD semakin besar. Dalam lensa otonomi daerah, pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan paling pokok dari jenis penerimaan lainnya yang merupakan penjabaran dari UU NO. 33 Tahun 2004.

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam penerimaan pemerintah daerah dalam format dan struktur I-account sebagaimana diatur dalam UU NO. 17 Tahun 2003 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebutkan dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana kapasitas fiskal suatu daerah dapat diukur berdasarkan PAD ini. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi,

potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Menurut Saragih (2003), peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif berpeluang untuk meningkatkan PAD. Perspektif pemerintah daerah tidak cukup hanya sekedar mengeluarkan bentuk regulasi terkait pajak atau retribusi, tetapi lebih fokus dalam membangun kekuatan ekonomi daerah. Ketika kegiatan ekonomi meningkat, aliran pendapatan pemerintah melalui PAD juga meningkat

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2013) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Retribusi daerah juga memiliki peranan yang cukup besar dalam kontribusinya sebagai penyumbang komposisi PAD. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi sendiri mencakup tiga objek utama yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

2.1.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan pada pasal 1 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang mana jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan antar-daerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tingkat Provinsi, sehingga pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. APBD merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produk domestik regional bruto dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif, dalam hal ini di Sulawesi Selatan dimana pemerintah melakukan pelebaran besaran belanja/pengeluarannya diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya juga dapat berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan daerah sehingga meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal yang besar merujuk pada kapasitas pemerintah untuk mengumpulkan dan menggunakan pendapatan fiskal dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang besar, pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen, seperti pajak, cukai, pelarasan, dan subsidi, untuk membiayai berbagai program dan proyek. Kapasitas fiskal yang besar juga berarti bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada pembangunan dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah berperan sebagai variabel dependen (Y) yang dalam hal ini berarti Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan teori tentang perkembangan belanja pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto akan mempengaruhi besaran pengeluaran pemerintah, besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, meningkatnya ekspansi aktivitas publik, semakin maju suatu perekonomian, ukuran pemerintah juga akan semakin besar yang mana ukuran pemerintah tersebut diukur dengan besarnya pengeluaran pemerintah, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama pertumbuhan sektor publik, yang berarti pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah berperan sebagai variabel independen (X) yang dalam hal ini berarti pengeluaran pemerintah mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto. Meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi

perekonomian secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan exogenous yang mengubah output agregat, atau pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah. Sehingga untuk mencapai target-target peningkatan Produk Domestik Regional Bruto pemerintah daerah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluarannya.

2.2.2 Hubungan Penerimaan Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup di setiap daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah tingkat kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ini dilihat dari faktor-faktor seperti kinerja pemerintah, keadilan sosial, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kesejahteraan.

Hendriwiyanto (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah dengan jumlah yang besar lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonomi daerah. Salah satunya dengan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi

sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Saat masyarakat merasa puas dengan layanan pemerintah, mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah. Hal ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk berinvestasi dan membangun bisnis di daerah tersebut. Selain itu, saat masyarakat merasa puas dengan layanan pemerintah, mereka cenderung menuangkan lebih banyak usaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka akan berusaha untuk memanfaatkan program-program pemerintah yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini akan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan pendapatan untuk masyarakat. Dengan demikian, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Asumsikan kondisi perekonomian di waktu sekarang, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto pada waktu sekarang dan membaiknya perekonomian akan mempengaruhi kondisi semua pelaku ekonomi di waktu sekarang, yakni rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah, maka meningkatnya kesejahteraan rumah tangga akan meningkatkan pendapatan mereka atau disposable income mereka yang selanjutnya akan memberikan stimulus pada peningkatan konsumsi dan investasi, sebab dalam proses konsumsi mereka bisa memilih apakah akan dibelanjakan langsung atau diinvestasikan dalam bentuk tabungan dan sejenisnya. Pada sisi pelaku ekonomi lain yaitu perusahaan di dunia usaha maka akan meningkatkan penjualan dan keuntungan serta investasi mereka. Nah, meningkatnya pendapatan rumah tangga dan perusahaan ini akan membawa pengaruh ke sisi penerimaan pemerintah dari pajak. Peningkatan penerimaan pemerintah akan meningkatkan belanja pemerintah. Hal tersebut

akan terakumulasi sehingga peningkatan konsumsi, investasi serta belanja pemerintah akan kembali meningkatkan PDRB.

Kesimpulannya, ada hubungan kausalitas yang jelas antara penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat merasa puas dengan layanan pemerintah, mereka akan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah. Ini akan menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dan membangun bisnis di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Sukmawan (2014). Penelitiannya “Pengaruh Ekonomi Makro Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Luwu Raya” dengan variabel penelitiannya terdiri dari pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah menggunakan time lag 1 tahun dan jumlah tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah melalui kabupaten/kota di Luwu Raya 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah menggunakan time lag 1 tahun dan jumlah tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Luwu Raya.

Penelitian oleh Edy Sutriyono (2018) dengan penelitiannya “Model Kausalitas dan Guncangan Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia” yang hasilnya menunjukkan beberapa variabel menunjukkan hubungan dua arah dan hanya satu arah. Guncangan terhadap variabel belanja

pegawai, bansos dan fungsi kesehatan tidak berpengaruh signifikan dan direspon oleh produk domestik bruto sedangkan belanja lainnya sangat berpengaruh. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dalam menyusun langkah dan kebijakan fiskal berikutnya agar meningkatkan peranannya dalam meningkatkan produk domestik bruto, sedangkan untuk masyarakat penelitian ini memberikan gambaran mengenai arah dan dampak dari APBN terhadap perekonomian.

Penelitian oleh Reizard (2019) dengan judulnya “Analisis Kausalitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017” dengan teknik Analisis yang digunakan adalah model analisis kausalitas dan metode Granger Causality test dengan data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan dua arah (bidirectional) antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. ketika Pertumbuhan Ekonomi mengalami perubahan maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan PAD di Sulawesi Utara dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah Sulawesi Utara melalui Pertumbuhan Ekonomi, dan sebaliknya kestabilan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara juga dapat dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah Sulawesi Utara melalui Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian oleh Sigit Harjanto (2014) dengan judulnya “Analisis Hubungan Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Indonesia. Menggunakan analisis kausalitas Toda-Yamamoto, dimana hasilnya ditemukan hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan

pengeluaran pemerintah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah yang mendukung Wagner's Law. Pada pengeluaran berdasarkan fungsi, ditemukan hubungan yang mendukung pendapat Keynes antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, sementara pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah fungsi yang lain tidak ditemukan adanya hubungan kausalitas.

Penelitian oleh Ratih (2015) dengan judulnya "Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang" yang menganalisis kausalitas kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang dengan variabel Indeks Williamson, Uji akar-akar unit (unit root test) dan uji kausalitas granger (granger causality test). Hasil analisis uji kausalitas granger menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta terdapat hubungan searah antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.

Penelitian oleh Bazan, C., Alvarez-Quiroz, V. J., & Morales Olivares, Y. (2022) dengan judul "*Wagner's Law vs. Keynesian Hypothesis: Dynamic Impacts*" hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hukum Wagner dan hipotesis Keynesian divalidasi di Peru (kedua hipotesis yang diperoleh dengan metodologi yang berbeda) dinyatakan sebagai fenomena dinamis yang memungkinkan kita memperoleh dampak jangka pendek dan jangka panjang, yang memungkinkan keberlanjutan bersama antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran publik. Dampak dinamis positif relatif terhadap hukum Wagner berada dalam rentang

teoritisnya, menunjukkan jenis kebijakan fiskal yang diadopsi, yang tercermin melalui elastisitas pendapatan dari pengeluaran publik.

Penelitian oleh Cristian C. Popescu dan Laura Diaconu (2021) "*Government Spending and Economic Growth : A Cointegration Analysis on Romania*" penelitian ini mengidentifikasi sifat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, untuk menguji dua teori Wagner dan Keynes, dalam kasus Rumania. Hasil yang diperoleh tidak menunjukkan adanya vektor kointegrasi jangka panjang, tetapi mendukung hubungan kausalitas ganda dalam jangka pendek. Oleh karena itu, PDB tidak hanya mewakili penyebab Granger untuk pengeluaran pemerintah tetapi juga sebaliknya.

Penelitian oleh Akhmad Solikin (2018). Penelitiannya "Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara sedang Berkembang : Tinjauan Sistematis" dengan variabel penelitiannya pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dalam hal ini data PDB, tenaga kerja, inflasi, ekspor, serta kategori belanja tertentu menggunakan metode analisis uji stasioneritas, kointegrasi dan kausalitas yang hasilnya bahwa hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dengan perkembangan perekonomian bersifat beragam (mixed). Terdapat hasil penelitian yang membuktikan Hukum Wagner, membuktikan Hipotesis Keynes, melaporkan keduanya (bidirectional), dan bahkan tidak berhasil membuktikan keduanya.

Penelitian oleh Parluhutan Hutahaean (2019) Penelitiannya "Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Analisis Kointegrasi dan Kausalitas" dengan variabel penelitiannya PDB konstan dan 3 variabel belanja negara yaitu belanja kementerian, belanja non kementerian dan transfer ke

daerah menggunakan 5 metode analisis korelasi, kausalitas, VECM, IRF dan FEVD yang hasilnya bahwa Belanja negara memang menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Terakhir, fluktuasi PDB konstan di masa sebelumnya secara konsisten menjadi faktor dominan yang membentuk PDB konstan di masa mendatang, sedangkan komponen – komponen belanja negara tidak memberikan kontribusi besar.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Perekonomian suatu daerah tentunya selalu mengalami siklus dimana ada pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Pemerintah daerah dalam mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung stabil, akan melakukan langkah-langkah melalui instrumen-instrumen terkait yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro yang dilakukan sebagai respon atas fluktuasi yang terjadi pada perekonomian.

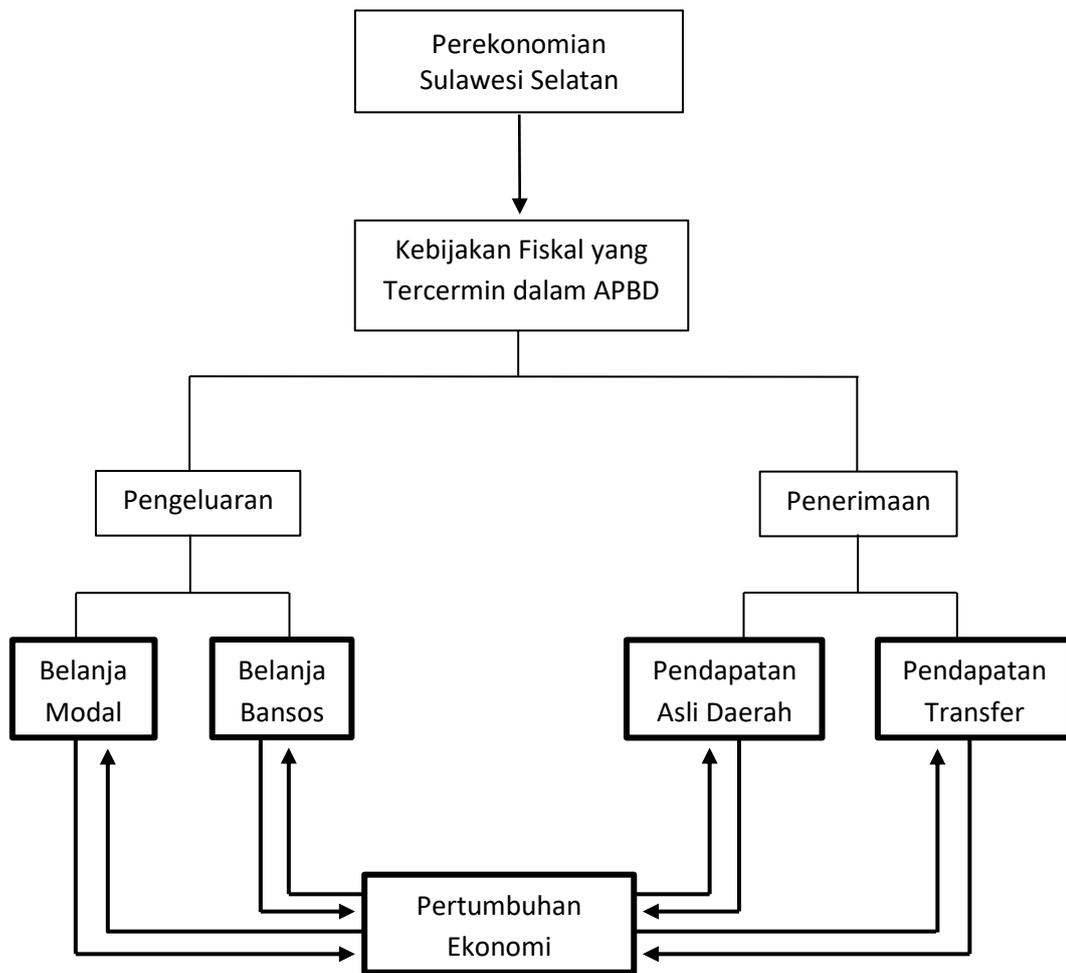
Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal yang sifatnya mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek, selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan kapasitas belanja untuk menggerakkan aktivitas perekonomian, menjaga kestabilan harga, pemerataan pendapatan dan lain-lain yang dampaknya pada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif. Peranan APBD sebagaimana sering dikatakan sebagai penstimulus dalam perekonomian maka tentu diperlukan alokasi yang tepat dalam portofolio per

jenis belanja dalam APBD tersebut. *Multiplier effect* yang akan muncul dari alokasi tersebut dapat berdampak kepada peningkatan investasi pembentukan modal tetap bruto, konsumsi rumah tangga dan ekspor, *multiplier effect* tersebut tidak hanya memberi dampak pada tahun bersangkutan saja, namun juga memberi pengaruh kepada tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar dampak alokasi APBD pada suatu jenis belanja di tahun anggaran tertentu dan tahun berikutnya, demikian pula sebaliknya. Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (dana transfer). Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pada penelitian ini belanja pemerintah daerah, penerimaan pemerintah daerah dan produk domestik regional bruto sebagai variabel dalam penelitian untuk mengetahui arah hubungan kausalitasnya masing-masing, apakah saling mempengaruhi positif dua arah atau satu arah. Belanja pemerintah daerah berperan sebagai variabel dependen yang dalam hal ini berarti produk domestik regional bruto mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, serta belanja pemerintah daerah juga berperan sebagai variabel independen, yang dalam hal ini berarti pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi produk domestik regional bruto, begitupun sebaliknya untuk penerimaan pemerintah dengan produk domestik regional bruto. Belanja pemerintah daerah, penerimaan

pemerintah daerah dan produk domestik regional bruto merupakan faktor endogen atau variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lain, dimana ketiga variabel tidak dapat dipastikan apakah endogen ataukah eksogen. Penelitian lainnya menunjukkan adanya hubungan antara belanja pemerintah dengan produk domestik bruto (*Keynesian*), sedangkan *Wagner's Law* menunjukkan adanya pengaruh produk domestik bruto terhadap belanja pemerintah.



Gambar 2.1. : Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, tinjauan pustaka, beberapa penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal dan belanja bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer di Provinsi Sulawesi Selatan.